

**IMPLEMENTASI PADA PROGRAM KOTAKU
(STUDI PADA PEMBANGUNAN SANITASI KHUSUSNYA SPALD-T DI
KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019)**

Ramadhan Saputra¹, Agus Hendrayady², Imam Yudhi Prasty³

Ramadhansaputraaa@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Kampung Bugis is one of the areas that has carried out the development of kotaku program. The area does not have a household waste treatment system according to technical requirements. Overall, the slums in Kampung Bugis village, namely RW 001 and RW 006, consist of 385 household units that do not have wastewater facilities and infrastructure in accordance with technical requirements, and 11.24 ha of unguarded wastewater treatment facilities and infrastructure, the total households that must be installed spald-T flow in coastal areas that are 200 households , then only realized 145 SR to 55 households that have not been covered by the SPALD-T flow. SPALD-T in Bugis Village is only focused on the disposal of feces and urine only. Of course this is still a problem because other disposals are still polluted into the sea. The research method in this study is descriptive qualitative. This type of research is descriptive qualitative, in this qualitative descriptive research researchers will provide a systematic, factual and accurate picture of the facts according to the scope of the study. Based on the results of the research, it can be concluded that the Implementation of Sanitation Development in Kotaku Program in Kampung Bugis Village Tanjungpinang City in 2019 has not been running optimally, this is due to several things that can be described as follows: For existing but inadequate facilities such as septi tanks and pipes that have suffered a lot of damage, then insufficient number of facilities in the development of sanitation in bugis village. Then there are still some people who ignore it and consider sanitation is not so important, especially for those who live in Bugis Village around the coast. There is still low awareness and community involvement in sanitation management, especially at the stage of utilization and maintenance of sanitation facilities and infrastructure in their own residential environment

Keywords: *Implementation, Sanitation, City Without Slums*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen penuh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) dimana salah satu tujuan pembangunannya adalah untuk mencapai akses lingkungan bersih yang memadai karena itu sejalan dengan tujuan negara, yakni untuk mensejahterakan rakyat dan sekaligus bentuk dari partisipasi Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia untuk menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dunia.

Berbicara mengenai tujuan negara yang mana di cantumkan pada UUD alenia ke-IV salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan yang kedua adalah pembangunan. Pembangunan dan perkembangan di Indonesia yang tidak terlepas dari pesatnya penduduk di wilayah darat dan khususnya wilayah pesisir yang memberikan beberapa dampak dari pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk di suatu pemukiman maka akan menambah keseriusan perhatian pada lingkungan tersebut. Menurut Budiharjo (2009:94) padatnya penduduk di suatu kota mengakibatkan semakin kurangnya sarana dan prasarana permukiman. jika perkembangan pembangunan wilayah maupun daerah yang begitu lamban maka akan memicu munculnya beberapa macam masalah, salah satunya kerusakan lingkungan.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak, dan lingkungan yang sehat aman dan harmonis di seluruh wilayah Indonesia.

Program Kotaku merupakan program kelanjutan dari PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang dahulunya bernama P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). kota tanpa permukiman kumuh Kotaku merupakan suatu step awal dari pemerintah pusat untuk mewujudkan sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kotaku adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) ini akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0% kumuh tanpa menggusur. Upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan yaitu 100 persen akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi.

Program ini dilaksanakan oleh 34 provinsi. Tanjungpinang salah satu ibukota provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu dari 34 provinsi tersebut. Kota Tanjungpinang memiliki luasan wilayah darat 14.587,42Ha, dan jumlah penduduk 258.487 Jiwa. Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (Empat) kecamatan yaitu Bukit Bestari, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Timur. Dengan jumlah penduduk yang begitu padat, sehingga keberadaan perumahan dan permukiman yang ada menjadi tidak tertata dengan baik atau kumuh. Program ini dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang mulai tahun 2016.

Pemerintah melalui walikota mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 dan dari surat itu menghasilkan Ada tujuh kawasan permukiman di Kota Tanjungpinang yang masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh, yakni Pelantar Sulawesi, Kawasan Pantai Impian, Kawasan Lembah Purnama, Kawasan Suka Berenang, Kawasan Tanjung Unggat, Kawasan Kampung Bugis, dan Kawasan Senggarang.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Pasal 10:

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Terhadap Permukiman Kumuh dan salah satu wilayah pesisir, Kampung bugis merupakan salah satu wilayah yang telah melaksanakan pembangunan program kotaku. Kawasan ini tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis.

Dalam mensukseskan program Kotaku tersebut, pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang melakukan penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) skala permukiman. Sistem pengelolaan air limbah terpusat merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah.

Dana yang digunakan SPALD-T bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) masuk menjadi dana APBD sebesar Rp. 2.060.000.000 (Dua Miliar Enam Puluh Juta Rupiah), dengan tujuan untuk membantu menandakan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Sub Bidang Air Limbah ini khususnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam penyediaan air limbah di Kampung Bugis pemerintah memberikan 4 (empat) unit SPALD-T yang berada di daerah pesisir yaitu di RW 006; RT 001, RT 002, RT 003. Dan RT 004. Setiap satu unit SPALD-T kouta yang diberikan Pemerintah 50 SR (Sambungan Rumah), Setelah teralisasi pembangunan SPALD-T tersebut ternyata

peneliti menemukan di lapangan masih terdapat rumah yang belum mendapatkan aliran SPALD-T dari yang sudah ditetapkan oleh Dinas PUPR.

Tabel 1.1 Daftar SPALD-T di kelurahan Kampung Bugis

SPALD-T RUMAH TANGGA	KUOTA SPALD-T	Sambungan Rumah
KSM ANAK RANTAU (RT 01)	50SR	35SR
KSM ANAK KASTURI (RT 02)	50SR	46SR
KSM ANAK PERTIWI (RT 03)	50SR	31SR
KSM ANAK RANTAU BUNGA SETANGKAI (RT 04)	50SR	33SR
JUMLAH	200SR	145SR

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan rumah yang harus dipasang aliran SPALD-T di daerah pesisir yaitu 200 rumah tangga, kemudian yang hanya terealisasi 145 SR jadi 55 rumah tangga yang belum tercover oleh aliran SPALD-T. SPALD-T yang berada di Kampung Bugis ini hanya fokus untuk pembuangan air tinja dan air seni saja. Tentunya ini masih menjadi permasalahan karena pembuangan lainnya masih tercemar ke laut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Implementasi Pembangunan Sanitasi Pada Program Kotaku Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tahun 2019?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penulis memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan Implementasi Program Sanitasi Kawasan Pesisir Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Menurut Sarwono (2006: 193) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan permasalahan yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar (2002: 38) tujuan penelitian deskriptif ini adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset seperti: siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada suatu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).

III. Hasil dan Pembahasan

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI PADA PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019

Dari hasil penelitian di lapangan maka diketahui bahwa Implementasi Pembangunan Sanitasi Di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang masih belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut. Sanitasi merupakan usaha menciptakan suatu keadaan atau perilaku hidup sehat dengan mengutamakan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas maupun perilaku yang mana untuk menghindarkan gangguan penyakit seperti diare. Sanitasi lingkungan merupakan status kesehatan lingkungan yang mencakup beberapa aspek antara lain pembuangan kotoran, perumahan, penyediaan air bersih dan sebagainya. Lingkungan sosial serta kelangsungan kehidupan manusia akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu sangat perlu adanya kebijakan tentang sanitasi dimana sangat mempengaruhi seluruh elemen kehidupan.

INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI PADA PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019

Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi implementasi tersebut, maka peneliti melihat dari indikator indikator yang mengacu pada pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono; 2013:99-101) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Standart Dan Sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan tepat Program yang diberikan kepada Kelurahan Kampung Bugis ini sudah berjalan dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan sesuai dengan standar yang mengacu dengan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh serta dalam hal teknisnya menggunkan buku pedoman petunjuk pelaksanaan sanitasi. Pada tahun 2018 kouta SPALD-T yang di berikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya 200 sambungan rumah dan yang terealisasi hanya 145 sambungan rumah, ternyata masih 55 unit rumah tangga yang belum terlayani dengan adanya pembangunan SPALD-T ini dan masih menggunakan kloset yang langsung mengarah ke laut.

2. Sumber Daya

Dalam sumber daya ini perlu dilihat dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya didalam pelaksanaan pembangunan SPALD-T ini sudah cukup maksimal. Akan tetapi sumber daya manusia disini yakni TFL dan KSM tidak diberikan pelatihan secara teknis dan administrsi terkait SPALD-T, semestinya untuk peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan pelatihan-pelatihan khusus tentang bagaimana mengelola pembangunan SPALD-T kepada KSM sesuai dengan keahliannya masing-masing dan untuk sumber daya peralatannya dari pembangunan SPALD-T ini sudah optimal.

3. Hubungan Antar Organisasi

Implementasi Dari sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Para pelaksana sudah mendapatkan sosialisasi terkait standar, tujuan dan sasaran dari pemerintah Kota Tanjungpinang, jadi koordinasikomunikasi antar instasi saling bekerjasama, sampai saat ini masih terjalin dengan baik. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang masih kurang paham manfaat dari adanya pengelolaan air limbah, karena RT/RW hanya sebatas menyampaikan kepada masyarakat tanpa mengarahkannya

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk Karakteristik Agen Pelaksana ini ialah kelompok yang mempunyai kewenangan atas pembangunan SPALD-T ini dan juga yang memberikan dukungan berlangsungnya implementasi dari kebijakan tersebut Pelaksana karakteristik ideal yang harus dimiliki adalah sikap yang tegas, kompeten dan memahami isi dari program. Dalam hal ini sudah baik, untuk pelaksanaan dari awal sampai dengan selesai ada yang mengawasi atau memantau pembangunan tersebut, dengan itu bisa dikatakan pelaksana bertanggung jawab dan mempunyai sikap tegas terhadap kegiatan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi Dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial yang terjadi setelah SPALD-T ini sudah berdiri menimbulkan dampak bagi masyarakat yaitu, salah satu dari SPALD-T mengeluarkan bau tidak sedap, masyarakat lebih nyaman dan memilih menggunakan yang lama dari pada menggunakan yang baru. Dari segi teknisnya disebabkan oleh faktor alam yang membuat pembangunan SPALD ini menjadi terhambat yaitu pasang surutnya air laut dikarnakan posisi pembangunan tersebut memang dikawasan pesisir dan faktor cuaca seperti hujan, terjadi kecemburuan sosial, karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari program ini. Terkait kondisi ekonomi, tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Tingkat pendidikan yang berada di Kelurahan Kampung Bugis yang berdasarkan data demografi paling mendominasi ialah lulusan SD/MI dengan jumlah 2780 jiwa, sedangkan jumlah tingkat pendidikan yang lainnya tidak terlalu mendominasi. Masyarakat yang berada di daerah pesisir yaitu RW 06 mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan atau Ibu Rumah Tangga (IRT) bisa dikatakan rendahnya pemahaman masyarakat. Sebab itu tidak tutup kemungkinan faktor ekonomi menjadi alasan pemasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini.

6. Disposisi

Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting , yaitu respon implementor terhadap kebijakan, kognisi dan intensitas disposisi implementor. Dalam variabel disposisi yang berkaitan dengan respon implementor terhadap kebijakan, implementor sangat mendukung secara positif adanya kebijakan pengelolaan air limbah

ini, karena program ini dapat mengurangi dampak permukiman kumuh dari indikator sanitasi. Dengan adanya dukungan dari keseluruhan implementor kebijakan maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi pembangunan program KOTAKU di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan bahwa implementasi pada peembangunannya hingga saat ini belum berjalan dengan baik dan optimal, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan akan diberinya sebanyak 200 sambungan dan dari observasi peneliti yang hanya menemukan 145 sambungan rumah, ternyata masih kurang 55 unit lagi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator yang mempengaruhi implementasi pengelolaan air limbah di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang sebagai berikut: Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan disposisi implementor.

V. Daftar Pustaka

1. Buku

- Budiman, Chandra. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Penerbit buku kedokteran EGC.
- Madani, Muhlis .2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam proses perumusan. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nugroho, Riant. 2014. Yogyakarta Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi.
- Nugroho, Riant. 2013. *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA
- Purwanto Erwan dan Ratih Diah S, 2015, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta. :Graha Ilmu.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama

Tachjan Dr. H. implementasi kebijakan publik. Bandung : 2006
Umar. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Y Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*: UNG Press Gorontalo 2015.

Zakaria Muchamad dan Mansyur Makbul dalam Implementasi Kebijakan Publik.2001:9.

2. Skripsi :

Aida Fitria Zahrina, Suryadi, Suwondo (2018) tentang Implementasi Program Gerakan Sanitasi Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan (Studi Kasus pada Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, Hal. 1832-1836

Apritania Dwi Putri Hastoni , Suryaningsih , Teguh Setiandika Igiyasi (2018) onstruksi Sosial Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal FISIP*. Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang

Hendra Syah Rizal (2017) tentang Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang

Rizki Rachmaddianto, Imam Hanafi, Heru Ribawanto (2018) tentang Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung) . *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 12, Hal. 1992-1996

S. Wahyuni, O. Setiani, and S. Suharyanto, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penataan Sanitasi Perkotaan Melalui Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 10, no. 2, pp. 111-122, Nov. 2012.

VI. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selama proses penelitian dan proses penulisan artikel sehingga selesai. Terkhusus kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.